

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang berfokus pada tiga pilar utama yakni pada sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam upaya mencapai ketiga pilar tersebut realisasi pembangunan ini harus dilaksanakan secara konstan dan konsisten dengan tetap memelihara kualitas hidup (*well being*) bagi masyarakat. Tahun 2015 saat sidang PBB ada 193 kepala negara yang menyetujui program ini dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada ke-17 tujuan ini disepakati untuk direalisasikan dalam jangka waktu pada 2015 hingga pada sasaran global di tahun 2030 mendatang. Upaya perolehan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam meniadakan *zero hunger* (tanpa kelaparan) mempunyai beberapa acuan dimana salah satunya adalah prevalensi malnutrisi pada anak sampai remaja.

Posisi Indonesia di tingkat ASEAN lebih buruk dibandingkan dengan Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Thailand (Abdurrahim, 2021). Oleh karena itu, pembangunan kesehatan menjadi aspek penting dalam proses pembangunan internasional maupun nasional. Kesehatan merupakan fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun, berbagai permasalahan kesehatan kerap

kali muncul seiring perkembangan zaman. Seperti halnya prevalensi malnutrisi yang terjadi di dalam dunia kesehatan menjadi hal yang krusial untuk dibahas. Malnutrisi terjadi ketika anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga membuat anak-anak gampang terserang penyakit seperti *wasting*, *underweight* dan *stunting*. *Wasting* merupakan sebuah keadaan dimana anak menderita gangguan gizi dengan diagnosis yang ditegakkan berdasarkan penilaian tinggi badan per berat badan. *Underweight* merupakan kondisi yang mana anak memiliki berat badan yang rendah pada rentang anak seusianya. Sedangkan *stunting* sendiri adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan sehingga postur tubuhnya lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya.

Stunting menjadi permasalahan global hampir di seluruh negara berkembang, khususnya di Indonesia. Walaupun Estimasi Malnutrisi 2023 yang dikeluarkan oleh UNICEF-WHO-World Bank Group menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* sejak tahun 2000, anak di bawah usia 5 tahun, yaitu sekitar 148,1 juta anak, masih mengalami *stunting* pada tahun 2022 (Unicef, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengatasi masalah *stunting*, tantangan ini masih sangat serius berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, penanganan prevalensi *stunting* menjadi salah satu target dari Program *Sustainable development goals* (SDGs) dan menjadi rencana pembangunan berkelanjutan dalam menangani berbagai permasalahan di dunia.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda aksi global yang berlandaskan pada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk menggerakkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkesinambungan pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan lingkungan.

Indonesia masih tercatat sebagai negara yang sudah lama menghadapi masalah di bidang kesehatan terutama pada kasus balita pendek atau *stunting*. *Stunting* sendiri ialah suatu masalah kekurangan gizi kronis yang dikarenakan asupan gizi yang masuk pada tubuh seseorang sangat minim dalam jangka waktu cukup lama akibat dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dalam tubuh seseorang (Rahmadhita, 2020). Permasalahan ini bukan merupakan perkara yang baru lagi hampir di beberapa negara berkembang mengalami masalah gagal tumbuh pada bayi atau balita. Kondisi seperti ini menjadi perhatian yang cukup besar bagi negara-negara yang terlibat dalam agenda pada 2030 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable development goals* (SDGs). Salah satu *goals* dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah target 2 *zero hunger* atau tanpa kelaparan yaitu dengan mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian yang berkesinambungan.

Menurut laporan dari laman Unicef (n.d) yang menjelaskan bahwa terdapat jutaan anak-anak dan remaja Indonesia terancam oleh tingginya anak yang memiliki kondisi dengan bertubuh pendek (*stunting*) dan kurus

(wasting) serta 'beban ganda' atau malnutrisi yang berarti kekurangan dan kelebihan gizi. Tingginya kasus gizi buruk pada anak-anak menunjukkan bahwa Indonesia memiliki masalah kesehatan terutama dalam hal gizi yang cukup serius. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif serta sistematis dan masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi tentang gizi yang seimbang dengan menerapkan pola makan yang sehat agar anak tidak berpotensi mengalami resiko *stunting*.

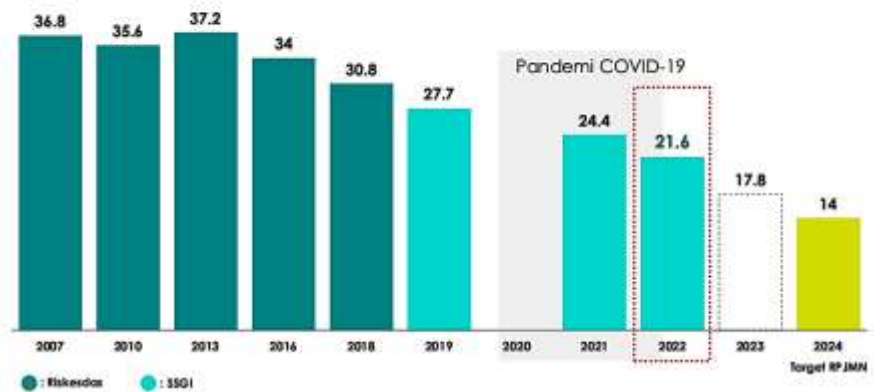
Martony (2023) berpendapat bahwa *stunting* adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, yang memiliki implikasi dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa emas tumbuh kembang seorang anak, *stunting* merupakan kondisi dimana seorang anak kekurangan nutrisi, terutama pada awal masa kehidupan (Hilmi dan fatharani, 2021). Peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, integratif, dan berkualitas. Peraturan dan kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan *stunting* ini, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program dalam upaya mempercepat

angka penurunan *stunting* pada tiap daerah. Hal ini tertuang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah memiliki andil cukup besar untuk menentukan kebijakan dan langkah yang sesuai guna mengatasi prevalensi *stunting*. Terlihat pada tabel 1.1 tentang angka *stunting* dari hasil Survei Status Gizi Indonesia yang turun dari 2021 ke 2022 di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase *Stunting* Berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022

Angka *stunting* SSGI turun dari 24.4% di 2021 menjadi 21.6% di 2022



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka *stunting* di Indonesia terus mengalami penurunan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini merupakan hasil dari kolaborasi proaktif antara pemerintah, lembaga sosial masyarakat, pihak swasta dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam upaya mengatasi permasalahan gizi buruk ini dan memastikan masa depan yang lebih sehat dan gemilang bagi generasi mendatang di Indonesia. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk para ahli gizi, praktisi medis,

edukator, dan orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang bisa menopang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, yaitu dengan menurunkan angka prevalensi *stunting* di Indonesia menjadi 14%. Hal ini mencerminkan tekad dan komitmen pemerintah dalam mengentaskan prevalensi *stunting* yang telah lama menghantui Indonesia.

Demi mendukung program percepatan penanganan kasus *stunting* di Indonesia pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 44,8 triliun. Anggaran sebesar Rp 34,1 triliun tersebut dialokasikan untuk belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp 1,8 triliun. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan *stunting* melalui Program Percepatan Pencegahan *Stunting* merupakan program prioritas nasional yang didukung langsung oleh pimpinan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan pemerintah pada tingkat desa.

Peran masyarakat sebagai faktor penguat diperlukan untuk mempercepat penurunan angka *stunting*. Keluarga memiliki peran aktif sebagai lingkungan pertama dalam menyediakan kebutuhan gizi, sumber informasi gizi, dan menerapkan makan makanan sehat sedini mungkin

untuk membentuk perilaku anak agar suka terhadap makanan yang bergizi. Keluarga juga sebagai *agen of control* dan pendamping utama dari asupan gizi yang masuk pada anak-anaknya. Tidak hanya itu, perlunya edukasi ke masyarakat tentang penerapan pola gizi seimbang dan *stunting* ini tidak hanya menasar pada ibu hamil saja, tetapi remaja diharapkan paham akan pentingnya perencanaan keluarga. *Stunting* ini adalah sebuah siklus dimana jika calon ibu memiliki gizi yang kurang seja remaja pastinya akan beresiko memiliki anak yang kurang gizi. Untuk itu, perlu adanya peran serta seluruh komponen masyarakat dalam penanganan dan pencegahan *stunting* sejak dini.

Adanya peraturan presiden yang dikeluarkan membuat percepatan penurunan prevalensi *stunting* berbeda pada tiap daerahnya. Melihat dari kacamata kondisi sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur kesehatan di tiap lokasi yang berbeda-beda membuat pemerintah daerah mencanangkan berbagai inovasi untuk mempercepat angka penurunan *stunting* di daerah masing-masing. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi penyumbang anak dengan kasus *stunting* dengan dinamika persentase yang cukup stabil dan cenderung menyusut tiap tahunnya. Namun, angka prevalensi *stunting* hampir sama dengan angka *stunting* di skala tingkat nasional (Maulana et. al., 2023).

Kota Malang yang dikenal dengan ciri khasnya sebagai kota pendidikan dimana secara kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) paham serta memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatan serta penerapan pola

hidup sehat dengan menjaga gizi yang seimbang. Maka dari itu, *stakeholder* tentu mempunyai peranan penting dalam penanganan prevalensi *stunting* di setiap wilayahnya. Jika berbicara tentang kota pendidikan sudah sepatutnya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut juga ikut terdidik sehingga masyarakat dapat bersinergi untuk mengentaskan masalah *stunting* ini dengan cepat dan tepat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat di beberapa wilayah yang terdapat di Kota Malang masih memiliki pemahaman yang minim terkait pentingnya asupan gizi bagi anak-anaknya. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab kasus prevalensi *stunting* masih ada sampai saat ini.

Menurut informasi dari Dinas Kesehatan Kota Malang (2023) pada bulan Februari 2023, tercatat ada 3.048 anak di Kota Malang yang berisiko mengalami *stunting*. Angka ini mewakili 8,9 persen dari total 34.382 anak yang berpartisipasi dalam program penimbangan berat badan. Dilansir dari website resmi Dinas Kesehatan Kota Malang (2021) berdasarkan hasil dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 di Kota Malang menunjukkan angka penurunan prevalensi *stunting* sebesar 6,2 % selama periode 5 tahun, yaitu dari 29,6% (2013) menjadi 23,4% (2018). Sedangkan pada tahun 2021 data prevalensi *stunting* berada pada 14,5% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi pada tingkat prevalensi 9,4% (Kemendagri RI, 2023). Dari tahun ke tahun Kota Malang telah mencatat trend penurunan angka prevalensi *stunting* secara signifikan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait menunjukkan

komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan bersama-sama membangun masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Selaras dengan tujuan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kota Malang tentu saja perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi, kelompok masyarakat, dan sektor swasta. Dalam usaha penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Malang diperlukan koordinasi dan dukungan dari berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kota Malang. Dinas Kesehatan memiliki peranan yang sentral serta vital dalam memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan aksesibilitasnya bagi seluruh warga. Sedangkan Dinas Sosial sebagai sekretariat utama pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Adanya kolaborasi ini, sasaran *stunting* bisa mendapatkan penanganan kesehatan yang sesuai serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dilakukan secara rutin. Kolaborasi yang dilakukan bersama-sama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada para anak-anak pada sekolah PAUD sampai SD di Kota Malang. Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana juga turut berkontribusi dalam upaya penanganan prevalensi dengan berbagai program yang salah satunya adalah *rembuk stunting*.

Pemerintah Kota Malang juga menurunkan instruksi Wali Kota Malang yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Malang No.188/45/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Tim ini nantinya yang akan berkeliling untuk melakukan survey data dan menjadi penggerak dalam menurunkan angka *stunting*. Disamping itu, Pemerintah Kota Malang bersama Dispangtan juga mendistribusikan bantuan pangan sebanyak 3.220 paket pada lima kecamatan di Kota Malang untuk membantu keluarga *stunting*. Dalam proses penyalurannya Dinkes Kota Malang menggandeng PT. Pos Indonesia dan juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang agar bantuan pangan ini tersalurkan secara merata. Dengan adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari berbagai instansi tersebut, diharapkan upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dapat dilakukan secara menyeluruh dan *sustainable* (berkelanjutan).

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang menyoar tentang penanganan *stunting* di daerah tertentu, misalnya Rahmasari dan Wicaksono (2022) yang membahas bagaimana implementasi penanganan *stunting* di Kabupaten Jember untuk mencapai target *Sustainable development goals*. Menurut penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan untuk menangani kasus *stunting* di Kabupaten Jember saat ini sudah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang tepat serta terlaksana dengan baik. Diterangkan juga bahwa sumber anggaran dan sikap pemerintah daerah dirasa sudah mendukung dalam proses

percepatan penurunan *stunting*. Sehingga Kabupaten Jember dapat menelaraskan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target SDGs. Beberapa penelitian sebelumnya juga menjelaskan tentang upaya penurunan angka *stunting* yang dilihat dari berbagai sudut pandang intervensi baik itu spesifik maupun sensitif dari berbagai daerah lokasi penelitian yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya.

Hal ini menarik untuk dikaji kembali dengan subjek dan objek yang berbeda karena berfokus pada penanganan *stunting* untuk mempercepat terealisasinya program SDGs pada point tujuan *zero hunger*. Penelitian ini akan dilakukan di empat dinas di Kota Malang, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat menjadi tolak ukur sejauh mana pelaksanaan program penanganan prevalensi *stunting* di Kota Malang. Keempat dinas ini menjadi tempat penelitian yang sesuai untuk diteliti lebih jauh dengan diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi program *Sustainable development goals* (SDGs) dalam upaya penanganan *stunting* di Kota Malang sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang di sudah turunkan. Tujuannya adalah agar bisa selaras dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan pada tujuan tanpa kelaparan (*zero hunger*)

untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti deskripsikan pada rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi program *Sustainable development goals* (SDGs) dalam upaya penanganan prevalensi *stunting* di Kota Malang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program *Sustainable development goals* (SDGs) dalam upaya penanganan prevalensi *stunting* di Kota Malang yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat peneliti deskripsikan pada tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan implementasi program *Sustainable development goals* (SDGs) dalam upaya penanganan prevalensi *stunting* di Kota Malang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*,
2. Untuk menganalisa dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi program *Sustainable development goals* (SDGs) dalam upaya penanganan prevalensi *stunting* di Kota Malang yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan juga kontribusi dalam bidang kesehatan terkait penurunan prevalensi *stunting* di Kota Malang sehingga selaras dengan implementasi dari target program *Sustainable development goals* (SDGs) untuk membuat dunia tanpa kelaparan (*zero hunger*) dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran penulis.

1.4.2 Secara Praktis

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi pembaca mengenai penurunan prevalensi *stunting* yang sejalan dengan program *Sustainable development goals* (SDGs) pada point *zero hunger*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi/lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, pertanian dan instansi pendidikan sebagai referensi terkait kajian ilmu sosial dalam mempelajari kasus *stunting* di Kota Malang yang sejalan dengan dengan implementasi program *Sustainable development goals* (SDGs) pada point *zero hunger*.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan diskusi untuk menemukan cara-cara yang efektif dalam upaya penurunan angka *stunting* di Kota Malang.